

DINAMIKA STAKEHOLDER DALAM PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG DI RPH MANGUNAN, KPH YOGYAKARTA

Eko Widodo Saputro¹

Dwiko Budi Permadi²

INTISARI

Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan merupakan salah satu resort di Balai KPH Yogyakarta yang menjalani kemitraan dengan masyarakat dengan bentuk kerja sama pemanfaatan hutan khususnya pada bidang jasa lingkungan wisata alam pada hutan lindung. Pemanfaatan hutan lindung semula berorientasikan pada hasil hutan non kayu seperti minyak kayu putih, madu, sutera, getah pinus, dan lain – lain. Perubahan orientasi ini menyebabkan perubahan terutama pada *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan *stakeholder* dan menganalisis perubahan kepentingan, pengaruh, peran dan hubungan antar *stakeholder* sebelum dan sesudah perubahan orientasi pengelolaan hasil hutan non kayu ke jasa lingkungan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan studi kasus untuk memahami fenomena yang ada. Penentuan informan kunci menggunakan kombinasi antar teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi literatur. Analisis *stakeholder* dilakukan dengan mengidentifikasi matriks kepentingan dan pengaruh serta peran *stakeholder* dengan menganalisis 3R (*rights, responsibilities* dan *revenues*) dan hubungan antar *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 *stakeholder* sebelum kemitraan wisata dan 15 *stakeholder* setelah kemitraan wisata. *Stakeholder* yang terlibat sebelum kemitraan wisata mampu beradaptasi dan berubah kepentingan serta pengaruhnya. Perubahan *stakeholder* dari *marginal key players* menjadi *key players* sebagai bentuk adaptasi Kelompok Tani untuk menjadi Koperasi Noto Wono. Peran Pemerintah Desa dan Kecamatan menjadi lebih aktif dibanding sebelumnya. Hubungan antar *stakeholder* menjadi lebih kompleks dan rumit sehingga membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: Perubahan kebijakan, kemitraan, wisata alam, matriks *stakeholder*, Koperasi Noto Wono

¹Mahasiswa Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada

²Dosen Pengajar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada

STAKEHOLDER DYNAMICS IN THE MANAGEMENT OF MANGUNAN PROTECTED FOREST RESORT, YOGYAKARTA FOREST MANAGEMENT UNIT

Eko Widodo Saputro¹

Dwiko Budi Permadi²

ABSTRACT

Forest Management Resort (RPH) Mangunan is one of the resorts in the Yogyakarta Forest Management Unit (KPH) which is currently in partnership with the community in the form of cooperation in forest utilization, especially in the sector of ecotourism environmental services in protected forests. The use of protected forests was originally oriented to non-timber forest products such as eucalyptus oil, honey, silk, pine resin, and others. This change in orientation leads to changes, especially for stakeholders involving in forest management. This study aims to map stakeholders and analyze changes in the interests, influences, roles and relationships between stakeholders before and after changes in orientation of management of non-timber forest products to environmental services.

The approach used in this study is qualitative descriptive using a case study to understand the existing phenomena. Determination of key informants using a combination of purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection was done by interview, observation and literature study. Stakeholder analysis was carried out by identifying the matrix of interests and influences and the role of stakeholders by analyzing 3R (rights, responsibilities and revenues) and relationships between stakeholders. The results showed that there were 7 stakeholders before the ecotourism partnership and 15 stakeholders after the ecotourism partnership. Stakeholders involved before ecotourism partnerships are able to adapt and change their interests and influences. Changes in stakeholders from marginal key players to key players as a form of adaptation of the Farmers Group to become Koperasi Noto Wono. The role of the Village and District Governments is more active than before. The relationship between stakeholders becomes more complex and complicated so that it requires effective and efficient coordination and communication.

Keywords: Policy change, partnership, ecotourism, stakeholder matrix, Noto Wono cooperative

¹Student of Forest Management Department, Faculty of Forestry, Universitas Gadjah Mada

²Lecturer of Management Forest Department, Faculty of Forestry, Universitas Gadjah Mada